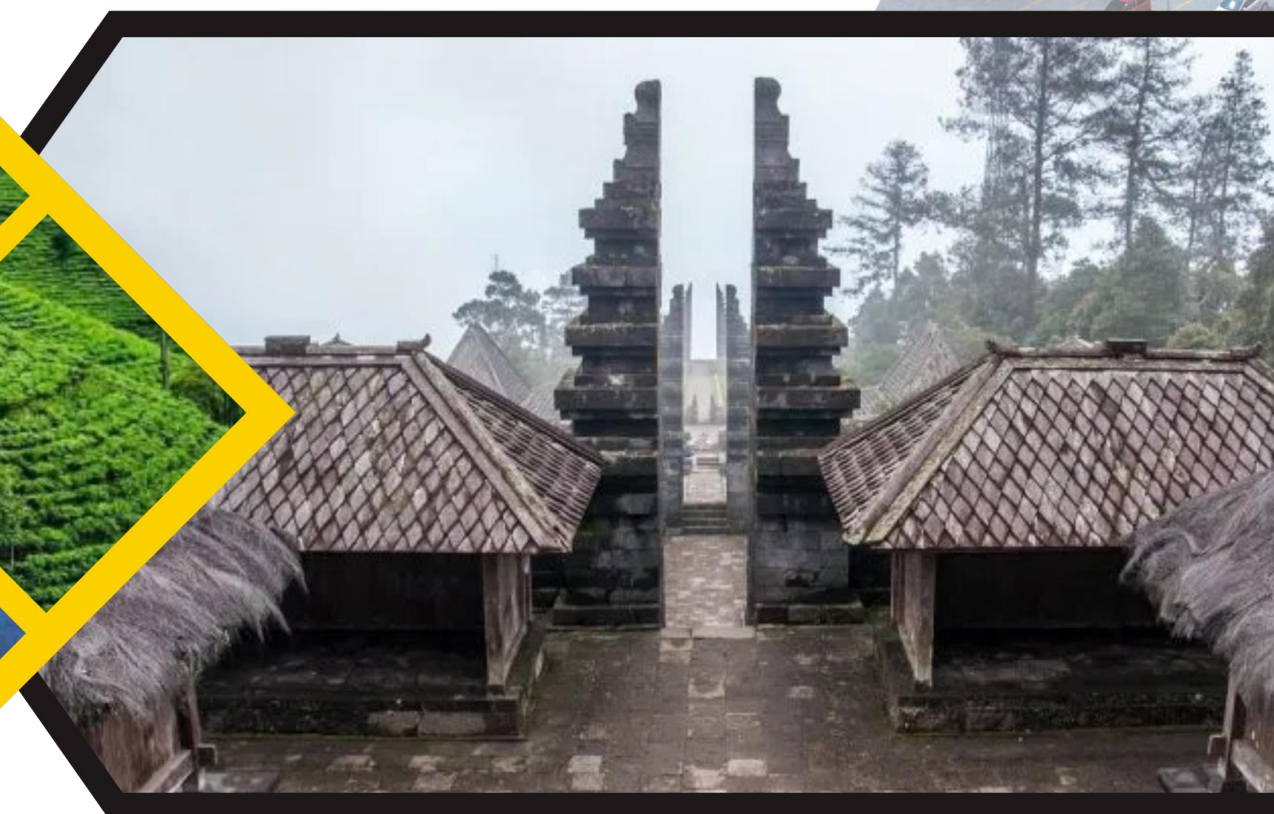
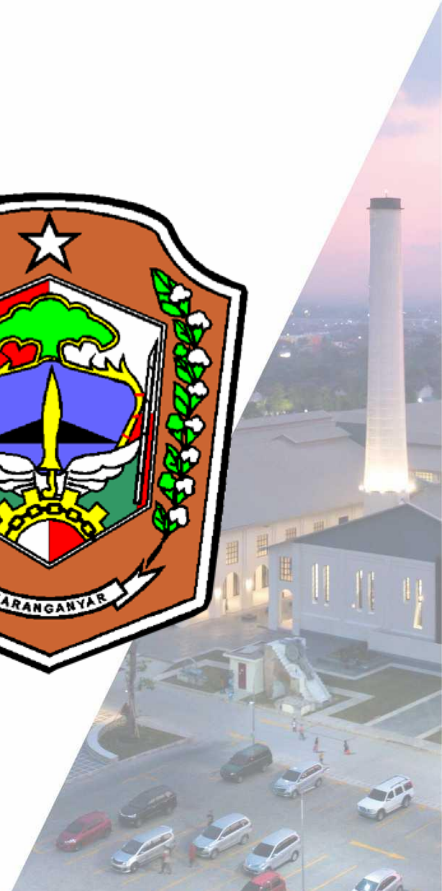


LPT

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

TAHUN **2022**



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. LATAR BELAKANG	I-1
B. DASAR HUKUM	I-2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	I-4
BAB II DESKRIPSI UNIT KERJA	II-1
A. TUGAS DAN FUNGSI	II-1
B. JUMLAH PROGRAM NASIONAL YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR	II-1
C. <i>STANDARD OPERATING PROCEDURE</i> (SOP) BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR	II-1
D. PERDA/PERBUP YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	II-3
E. STRUKTUR ORGANISASI	II-4
F. KEPEGAWAIAN	II-5
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	III-1
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	III-1
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	III-1
C. URUSAN PILIHAN	III-1
D. URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PENUNJANG	III-1
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	IV-1
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	IV-1
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	IV-1
C. URUSAN PILIHAN	IV-1
D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	IV-1

BAB V	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	V-1
	A. TUGAS YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PUSAT	V-1
	B. TUGAS YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PROVINSI	V-2
BAB VI	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ...	VI-1
	A. URUSAN PENDIDIKAN	VI-1
	B. BIDANG URUSAN KESEHATAN	VI-1
	C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM	VI-1
	D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	VI-1
	E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	VI-1
BAB VII	INOVASI DAN PENGHARGAAN	VII-1
	A. INOVASI	VII-1
	B. PENGHARGAAN.....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1
	A. KESIMPULAN	VIII-1
	B. SARAN	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Pegawai Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022	II-5
Tabel 2.2	Daftar Pejabat Struktural yang Telah Terisi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2022	II-6
Tabel 2.3	Daftar Pejabat Struktural yang Belum Terisi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2022	II-8
Tabel 2.4	Daftar Pejabat Fungsional yang Telah Terisi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2022	II-8
Tabel 2.5	Daftar Pejabat Fungsional yang Belum Terisi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ..	II-9
Tabel 4.1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.....	IV-1
Tabel 5.1	Tugas yang Diterima BAPERLITBANG dari Pemerintah Pusat Tahun 2022	V-1
Tabel 5.2	Tugas yang Diterima BAPERLITBANG dari Pemerintah Provinsi Tahun 2022	V-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022	II-6
-------------	--	------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e, dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi :

1. Perencanaan
2. Keuangan
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
4. Penelitian dan pengembangan
5. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dilakukan berdasarkan asas (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, (2) Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah, (3) Efisiensi, (4) Efektivitas, (5) Pembagian habis tugas, (6) Rentang kendali, (7) Tata kerja yang jelas dan (8) Fleksibilitas.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar melaksanakan 2 (dua) urusan penunjang yaitu urusan Perencanaan. dan urusan Penelitian dan Pengembangan. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan daerah. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan
6. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani sektor perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini BAPERLITBANG berkewajiban menyajikan Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Kerja yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BAPERLITBANG sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Konsep penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dipersiapkan dan disusun oleh BAPERLITBANG dengan melibatkan dinas / instansi / unit kerja, legislatif (*stake holder*) melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terpola dan terpadu dengan menyerap aspirasi masyarakat luas.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam program kerja selama satu tahun anggaran perlu dilaporkan dan dievaluasi untuk menilai kinerja BAPERLITBANG. Pelaksanaan program kerja meliputi pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan daerah yang disajikan dalam bentuk data kuantitatif yang dirangkum dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 119);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 70);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2021 lampiran XX tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini dimaksudkan untuk menginformasikan pencapaian indikator Tahun 2022 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun tujuan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Melaporkan langkah-langkah tindakan strategi yang telah ditempuh dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar selama Tahun Anggaran 2022.
2. Melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar atas pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2022.

BAB II

DESKRIPSI UNIT KERJA

A. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 BAB III tentang Tugas dan Fungsi Pasal 4 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 BAB III tentang Tugas dan Fungsi Pasal 4, selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
6. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. JUMLAH PROGRAM NASIONAL YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR

NIHIL

C. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagai unsur pelaksana dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar, sampai dengan Tahun 2022 sudah memiliki 6 (enam) buah SOP (*Standar Operasional Prosedur*) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, disahkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 050/57 Tahun 2013 tertanggal 10 Desember 2013.
2. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 050 / 58 Tahun 2013 tertanggal 10 Desember 2013.
3. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kegiatan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKT SKPD)
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kegiatan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKT SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 050 / 59 Tahun 2013 tertanggal 10 Desember 2013.
4. Penyusunan Review Indikator Kinerja Utama
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Review Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 050 / 60 Tahun 2013 tertanggal 10 Desember 2013.
5. Penyusunan Indikator Kinerja Utama
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 050 / 61 Tahun 2013 tertanggal 10 Desember 2013.
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 050 / 62 Tahun 2013 tertanggal 10 Desember 2013.

D. PERDA / PERBUP YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2032.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 70);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 119).

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 73).
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 89);

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

Susunan Pejabat struktural Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana
4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya
5. Kepala Bidang Ekonomi
6. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program
 - a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

F. KEPEGAWAIAN

1. Daftar Pegawai Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

Tabel 2.1
Daftar Pegawai
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar
(Desember 2022)

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
1.	DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.	19730614 199303 1 002	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
2.	JOKO TRI SUSENO, S.T., M.T.	19671121 199803 1 010	PNS	Pembina (IV/a)
3.	HARMINI, S.E., M.M.	19650720 198603 2 011	PNS	Pembina (IV/a)
4.	ENDRO DWIMIHARJO, S.T., M.M.	19781106 200501 1 005	PNS	Pembina (IV/a)
5.	RITA HERMAWATI, S.P.	19710416 199603 2 002	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
6.	ADIT KURNIAWAN HARIYANTA., A.Md.	19841120 201001 1 018	PNS	Penata Muda (III/b)
7.	RISTY DIAN ANGGRAENI, A.Md.	19941004 202203 2 015	PNS	Pengatur (II/c)
8.	AMIRURROHMAN NUR GATI HUDAYA, S.Kom.	19850607 201903 1 007	PNS	Penata Muda (III/a)
9.	SUKIMAN	19790423 200801 1 016	PNS	Juru tingkat I (I/d)
10.	AGUNG SRI AJI, S.P., M.M.	19731231 199903 1 022	PNS	Pembina (IV/a)
11.	EKO WALUYO JATI HIDAYAT RAHAYU, S.T.	19700923 198803 1 007	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
12.	MUHAMMAD NEVI TRI ANDRIYANTO, SP. MM.	19800413 200501 1 007	PNS	Pembina (IV/a)
13.	HENRI WINANDAR , S.T.,M.Si	19860525 200902 1 001	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
14.	SUFİYANA EKA PRATIWI, S.Si.	19941215 201903 2 022	PNS	Penata Muda (III/a)
15.	DARUL AMAL SHOLIHAH, S.P.W.K.	19960624 201903 2 012	PNS	Penata Muda (III/a)
16.	WIYONO, S.Sos., M.Si.	19670503 198903 1 010	PNS	Pembina (IV/a)
17.	VIRA AGUSTINA WULANDARI, S.T., M.M.	19710830 200501 2 006	PNS	Penata Tk. I (III/d)
18.	NUGROHO DWI SAPUTRO, S.E., M.P.A.	19840920 200902 1 004	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
19.	ALEX YULIANTO, S.Si.	19770706 201001 1 012	PNS	Penata (III/c)
20.	SARIMAN, S.E.	19721204 200701 1 023	PNS	Penata Muda Tingkat I (III/b)
21.	HARI WALUYO, S.H., M.M.	19701009 199803 1 007	PNS	Pembina (IV/a)

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
22.	SADIMIN, S.H., M.M.	19660910 199203 1 009	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
23.	DODIK SETYO WIARTO, S.E.	19760202 200902 1 003	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
24.	DIDIK ARI PRAHASTA, S.E.	19810904 201001 1 012	PNS	Penata (III/c)
25.	PURWOKO JOKO SARONO, S.E.	19700830 200801 1 003	PNS	Pengatur (II/c)
26.	ORYZA SATIVA, S.E.	19920212 202012 2 007	PNS	Penata Muda (III/a)
27.	EKO WICAKSONO SETYO PAMBUDI., S.E.	19951110 202012 1 006	PNS	Penata Muda (III/a)
28.	Dr. NINING INDRAMASTUTI, S.T., M.T.	19761026 200604 2 022	PNS	Pembina (IV/a)
29.	TRIO HARTONO, S.E., M.Eng.	19781030 200902 1 001	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
30.	SRI SUDARWATI, S.P.	19820602 200604 2 016	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
31.	SUSWAN CHRISTIONO, S.E.	19840923 200902 1 005	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
32.	NASIR KHOIRUDIN, S.S.T., M.A.P.	19870618 200912 1 005	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
33.	SISWANTO, A.Md.	19880528 201212 1 001	PNS	Pengatur Tingkat I (II/d)

Sumber : Data Kepegawaian BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

2. Daftar Pejabat Struktural Perangkat Daerah yang Terisi

Tabel 2.2
Daftar Pejabat Struktural yang Telah Terisi
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar
(Desember 2022)

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1.	DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.	Kepala	DIKLATPIM II	Pembina Tk. I (IV/b)
2.	JOKO TRI SUSENO, S.T., M.T.	Sekretaris	DIKLATPIM IV	Pembina (IV/a)
3.	HARMINI, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum	-	Pembina (IV/a)
4.	AGUNG SRI AJI, S.P., M.M.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana	DIKLATPIM IV	Pembina (IV/a)
5.	Dr. NINING INDRAMASTUTI, S.T., M.T.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program	DIKLATPIM IV	Pembina (IV/a)

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
6.	TRIO HARTONO, S.E., M.Eng.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	Penata Tingkat I (III/d)
7.	WIYONO, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Ekonomi	ADUM	Pembina (IV/a)
8.	HARI WALUYO, S.H., M.M.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya	-	Pembina (IV/a)

Sumber : Data Kepegawaian BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

3. Daftar Pejabat Struktural Perangkat Daerah yang Belum Terisi

Tabel 2.3
Daftar Pejabat Struktural yang Belum Terisi
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar
(Desember 2020)

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	NIHIL	

Sumber : Data Kepegawaian BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

4. Daftar Pejabat Fungsional Perangkat Daerah

Tabel 2.4
Daftar Pejabat Fungsional yang Telah Terisi
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar
(Desember 2022)

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1.	ENDRO DWIMIHARJO, S.T., M.M.	19781106 200501 1 005	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat
2.	RITA HERMAWATI, S.P.	19710416 199603 2 002	Penata Laporan Keuangan pada Sekretariat
3.	ADIT KURNIAWAN HARIYANTA., A.Md.	19841120 201001 1 018	Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat
4.	RISTY DIAN ANGGRAENI, A.Md.	19941004 202203 2 015	Verifikator pada Sekretariat
5.	AMIRURROHMAN NUR GATI HUDAYA, S.Kom.	19850607 201903 1 007	Analisis Data dan Informasi pada Sekretariat
6.	SUKIMAN	19790423 200801 1 016	Pengadministrasi Umum pada Sekretariat
7.	EKO WALUYO JATI HIDAYAT RAHAYU, S.T.	19700923 198803 1 007	Perencana Ahli Muda pada Bidang Fisik dan Prasarana
8.	MUHAMMAD NEVI TRI ANDRIYANTO, SP. MM.	19800413 200501 1 007	Perencana Ahli Muda pada Bidang Fisik dan Prasarana
9.	HENRI WINANDAR, S.T.,M.Si	19860525 200902 1 001	Analisis Perencanaan pada Bidang Fisik dan Prasarana

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
10.	SUFİYANA EKA PRATIWI, S.Si.	19941215 201903 2 022	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Fisik dan Prasarana
11.	DARUL AMAL SHOLIHAN, S.P.W.K.	19960624 201903 2 012	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Fisik dan Prasarana
12.	SRI SUDARWATI, S.P.	19820602 200604 2 016	Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program
13.	SUSWAN CHRISTIONO, S.E.	19840923 200902 1 005	Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program
14.	NASIR KHOIRUDIN, S.S.T., M.A.P.	19870618 200912 1 005	Analisis Perencanaan pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program
15.	SISWANTO, A.Md.	19880528 201212 1 001	Pengelola Program dan Kegiatan pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program
16.	VIRA AGUSTINA WULANDARI, S.T., M.M.	19710830 200501 2 006	Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi
17.	NUGROHO DWI SAPUTRO, S.E., M.P.A.	19840920 200902 1 004	Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi
18.	SARIMAN, S.E.	19721204 200701 1 023	Analisis Perencanaan pada Bidang Ekonomi
19.	ALEX YULIANTO, S.Si.	19770706 201001 1 012	Analisis Perencanaan pada Bidang Ekonomi
20.	SADIMIN, S.H., M.M.	19660910 199203 1 009	Perencana Ahli Muda pada Bidang Sosial dan Budaya
21.	DODIK SETYO WIARTO, S.E.	19760202 200902 1 003	Perencana Ahli Muda pada Bidang Sosial dan Budaya
22.	DIDIK ARI PRAHASTA, S.E.	19810904 201001 1 012	Perencana Ahli Muda pada Bidang Sosial dan Budaya
23.	PURWOKO JOKO SARONO, S.E.	19700830 200801 1 003	Analisis Perencanaan pada Bidang Sosial dan Budaya
24.	ORYZA SATIVA, S.E.	19920212 202012 2 007	Analisis Perencanaan pada Bidang Sosial dan Budaya
25.	EKO WICAKSONO SETYO PAMBUDI., S.E.	19951110 202012 1 006	Analisis Perencanaan pada Bidang Sosial dan Budaya

Sumber : Data Kepegawaian BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

5. Daftar Pejabat Fungsional Perangkat Daerah yang Belum Terisi

Tabel 2.5
Daftar Pejabat Fungsional yang Belum Terisi
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar
(Desember 2020)

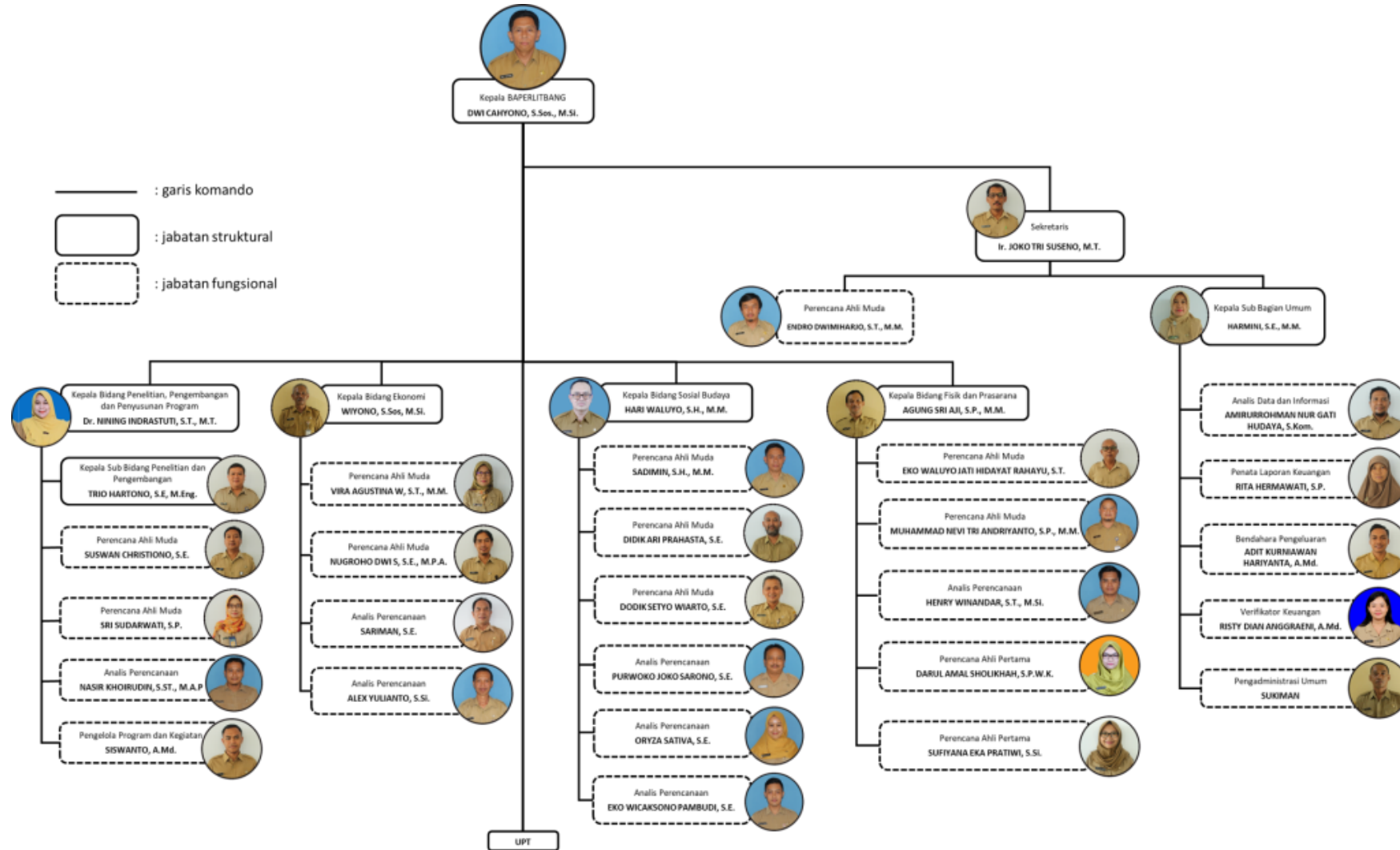
NO	NAMA	JUMLAH
1.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum yang bertugas sebagai pramu kantor	1 orang
2.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum yang bertugas sebagai pengemudi	1 orang
3.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum yang bertugas sebagai petugas kebersihan	1 orang
4.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum yang bertugas sebagai satuan pengamanan kantor	2 orang
5.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum yang bertugas sebagai Caraka	2 orang
JUMLAH		7 orang

Sumber : Data Kepegawaian BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

6. Struktur Organisasi SKPD

Gambar 2.1.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022**



BAB III
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

NIHIL

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

NIHIL

C. URUSAN PILIHAN

NIHIL

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

NIHIL

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Perencanaan, Penggangan , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 64.741.000,00 Realisasi: Rp. 64.516.000,00 Persentase: (99,65%)	Penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA) 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 4.154.838.250,00 Realisasi: Rp. 3.956.598.577,00 Persentase: (95,23%)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan	14 bulan (100.00%)		
				2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan laporan Penatausahaan	16 buku (100.00%)		

				Anggaran: Rp. 49.180.000,00 Realisasi: Rp. 49.137.100,00 Persentase: (99,91%)	keuangan dan laporan keuangan 16 buku			
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Anggaran: Rp. 4.855.000,00 Realisasi: Rp. 4.772.800,00 Persentase: (98,31%)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 dokumen	3 dokumen (100.00%)		
				2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Anggaran: Rp. 127.400.000,00 Realisasi: Rp. 125.572.000,00 Persentase: (98,57%)	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pegawai 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 8.633.000,00 Realisasi: Rp. 8.547.000,00 Persentase: (99,00%)	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 12 bulan	12 bulan (100.00%)		

			Daerah					
				2) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 7.762.500,00 Realisasi: Rp. 7.372.500,00 Persentase: (94,98%)	Pemenuhan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				3) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Anggaran: Rp. 9.389.000,00 Realisasi: Rp. 9.217.000,00 Persentase: (98,17%)	Pemenuhan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				4) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 13.970.100,00 Realisasi: Rp. 13.662.000,00 Persentase: (97,79%)	Pemenuhan Alat Tulis Kantor 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 12.000.000,00 Realisasi: Rp. 11.948.950,00 Persentase: (99,57%)	Pemenuhan Bahan Logistik Kantor 12 bulan	12 bulan (100.00%)		

				6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran: Rp. 5.894.800,00 Realisasi: Rp. 5.841.300,00 Persentase: (99,09%)	Pemenuhan Cetakan dan Penggandaan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 3.840.000,00 Realisasi: Rp. 3.840.000,00 Persentase: (100,00%)	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan serta surat kabar 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				8) Penyediaan Bahan/Material Anggaran: Rp. 9.126.000,00 Realisasi: Rp. 9.125.500,00 Persentase: (99,99%)	Pemenuhan Bahan / Material Kantor 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				9) Fasilitas Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 19.788.000,00 Realisasi: Rp. 19.755.000,00 Persentase: (99,83%)	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				10) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran:	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan (100.00%)		

				Rp. 132.606.000,00 Realisasi: Rp. 132.539.623,00 Persentase: (99,95%)	12 bulan		
			e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 135.225.000,00 Realisasi: Rp. 133.640.000,00 Persentase: (98,83%)	Pemenuhan Peralatan dan mesin 1 tahun	1 tahun (100.00%)	
			f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 37.630.000,00 Realisasi: Rp. 37.625.500,00 Persentase: (99,99%)	Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan 12 bulan	12 bulan (100.00%)	
				2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 72.200.000,00	Pemenuhan Jasa komunikasi sumber daya air	12 bulan (100.00%)	

				Realisasi: Rp. 61.962.372,00 Persentase: (85,82%)	dan listrik 12 bulan		
				3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 49.440.000,00 Realisasi: Rp. 49.440.000,00 Persentase: (100,00%)	Pemenuhan Jasa kebersihan kantor 12 bulan	12 bulan (100.00%)	
			g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 124.460.000,00 Realisasi: Rp. 123.214.548,00 Persentase: (99,00%)	Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang, pajak dan BBM kendaraan dinas / operasional berupa 14 kendaraan roda dua dan 9 kendaraan roda empat 12 bulan	12 bulan (100.00%)	
				2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 31.440.000,00 Realisasi: Rp. 30.774.000,00 Persentase: (97,88%)	Pemenuhan biaya service dan penggantian suku cadang Peralatan dan Mesin Lainnya 51 item	51 item (100.00%)	

				3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 51.900.000,00 Realisasi: Rp. 51.465.000,00 Persentase: (99,16%)	Pemenuhan biaya perawatan rutin / berkala Gedung Kantor 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
--	--	--	--	---	---	----------------------	--	--

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nihil

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PERENCANAAN		a. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, Kegiatan	1) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 560.000.000,00 Realisasi: Rp. 556.158.650,00	Dokumen Renja OPD 2022 43 dokumen	43 dokumen (100.00%)		

			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase: (99,31%)				
			b. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.983.750,00 Persentase: (99,84%)	Hasil kajian dan analisis 1 laporan	1 laporan (100.00%)		
			c. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 200.000.000,00 Realisasi: Rp. 198.554.460,00 Persentase: (99,28%)	Pemenuhan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 1 tahun	1 tahun (100.00%)		

			Daerah				
				2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.860.500,00 Persentase: (98,61%)	Laporan Triwulan, Semesteran, Tahunan 7 laporan	7 laporan (100.00%)	
			d. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Anggaran: Rp. 120.000.000,00 Realisasi: Rp. 117.366.950,00 Persentase: (97,81%)	Pelaksanaan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)	

				<p>2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Anggaran: Rp. 53.546.600,00 Realisasi: Rp. 53.006.150,00 Persentase: (98,99%)</p>	<p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen (100.00%)</p>		
				<p>3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Anggaran: Rp. 200.000.000,00 Realisasi: Rp. 196.229.109,00 Persentase: (98,11%)</p>	<p>Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pamsi mas, kemiskinan, SDGs, dan KKN 1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen (100.00%)</p>		

			e. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Anggaran: Rp. 108.850.000,00 Realisasi: Rp. 104.778.500,00 Persentase: (96,26%)	Pencapaian persentase indikator kinerja kegiatan bidang perekonomian yang memenuhi target 91 Persen	91 Persen (100.00%)		
				2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Anggaran: Rp. 252.669.000,00 Realisasi: Rp. 245.924.650,00 Persentase: (97,33%)	Kajian perencanaan perekonomian 2 Dokumen	2 Dokumen (100.00%)		

				3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Anggaran: Rp. 108.481.000,00 Realisasi: Rp. 106.937.200,00 Persentase: (98,58%)	Penyusunan dokumen roadmap ekonomi kreatif 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
		f. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Anggaran: Rp. 160.000.000,00 Realisasi: Rp. 154.951.409,00 Persentase: (96,84%)	Pemenuhan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Rakor Monev RKPD, FORGAB, Rakor Desk Perubahan Renstra, dan KOMIR) 4 kali	4 kali (100.00%)			
			2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Anggaran: Rp. 40.000.000,00 Realisasi: Rp. 38.459.350,00 Persentase: (96,15%)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan rencana kerja perangkat daerah di Bidang Infrastruktur 6 kali	6 kali (100.00%)			

				3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Anggaran: Rp. 235.000.000,00 Realisasi: Rp. 231.470.164,00 Persentase: (98,50%)	Penyusunan Dokumen FS Pengembangan Waduk Jlantah 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
2.	PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN		a. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEM BANGAN DAERAH, Kegiatan Peng embangan Inovasi dan Teknologi	1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Anggaran: Rp. 285.000.000,00 Realisasi: Rp. 274.265.930,00 Persentase: (96,23%)	Pelaksanaan Lomba krenova masyarakat dan pelajar 2 paket	2 paket (100.00%)		

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

H. UNSUR KEWILAYAHAN

Nihil

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Nihil

J. UNSUR KEKHUSUSAN

Nihil

BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

V.1. TUGAS YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PUSAT

Tabel 5.1.
Tugas yang Diterima dari Pemerintah Pusat
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

No	Kementrian/LPNK	Dasar Hukum	Uraian program dan Kegiatan	Lokasi	Jumlah Anggaran	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	% capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIHIL									

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, diolah.

V.2. TUGAS YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PROVINSI

Tabel 5.2.
Tugas yang Diterima dari Pemerintah Provinsi
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

No.	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Uraian program dan Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	% capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIHIL								

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, diolah..

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. URUSAN PENDIDIKAN

NIHIL

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

NIHIL

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

NIHIL

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

NIHIL

E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NIHIL

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

NIHIL

BAB VII

INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
	NIHIL	

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi pemberi Penghargaan
	NIHIL	

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagian besar sudah dilaksanakan dan mencapai target indikator kinerja sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan pada program kegiatan yang menunjukkan realisasi anggaran yang cukup baik sehingga perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi di tahun mendatang.

Realisasi program dapat dicapai secara keseluruhan sesuai target indikator kinerja yg sudah ditetapkan di RPJMD. Anggaran juga terserap dengan baik, rata-rata serapan semua kegiatan berada di angka 96%. Dengan demikian alokasi anggaran akan dipertahankan pada tahun anggaran yang akan datang agar capaian target indikator kinerja sesuai dengan yang sudah ditetapkan di RPJMD.

Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama Tahun 2022 kepada Bupati Karanganyar. Laporan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. SARAN

BAPERLITBANG sebagai Koordinator penyusunan rencana pembangunan daerah, membutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak, terutama Perangkat Daerah, agar dapat mewujudkan rencana pembangunan sesuai dengan agenda kerja atau *rolling plan*. Diperlukan dukungan dan kerjasama yang baik, yang sistematis/terstruktur sehingga terwujud dokumen perencanaan yang berkualitas, realistis dan konsisten.

Karanganyar, 30 Desember 2022

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**



DWICAHYONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730614 199303 1 002